

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial. Ia ada dan berkembang dengan individu yang lain. Dalam arti ini kehadiran orang lain merupakan hal yang mutlak. Hidup manusia adalah ada bersama.¹ Manusia adalah makhluk sosial. Manusia itu adalah seorang individu yang secara hakiki bersifat sosial. Sosial bukanlah tambahan situasi dari luar tapi secara hakiki menentukan manusia dalam individualitasnya dan kepribadiannya yang khas. Oleh karena itu, manusia hanya menjadi sungguh manusia karena ada orang lain. Sifat kesosialan inilah yang menjadi dasar bagi adanya negara sebagai institusi sosial politik.² Sebagai makhluk sosial perlu menyadari pentingnya aspek berada di antara sesama, mengakui yang lain dan memperlakukan sesama sebagai yang bermartabat dan memperkokoh konstruksi dialog dan komunikasi di antara sesama. Melalui ada bersama dengan yang lain akan menciptakan lembaga-lembaga dan menghasilkan “Negara”. Negara ada karena adanya manusia, sifat kesosialanlah yang mengadakan negara.

Kata “negara” sama dengan “*staat*” dalam bahasa jerman atau “*state*” dalam bahasa inggris yang mempunyai dua arti. Pertama, negara adalah masyarakat atau wilayah yang merupakan satu kesatuan politis. Kedua, negara

¹ Kasdin Sihotang, *Filsafat Manusia*, (Yogyakarta: Kanisius, 2009), hlm. 101.

² Norbert Jegalus, *Filsafat Sosial Politik*, (Manuskrip), (Kupang: Fakultas Filsafat Agama Universitas Widya Mandira, 2015), hlm. 2.

adalah lembaga pusat yang menjamin kesatuan politis itu, yang menata dan dengan demikian menguasai wilayah itu.³ Artinya masyarakat yang menciptakan negara dan negara mengatur dan menjamin kehidupan masyarakat.

Ajaran Plato tentang negara ditulis pada waktu kehidupan politik Yunani merosot. Pemerintahan negara menjadi rebutan orang-orang yang tidak memenuhi syarat, tetapi berambisi. Plato mempunyai pengalaman buruk dengan bentuk negara demokratis yang berdasarkan pemungutan suara terbanyak, membunuh Sokrates. Pengalaman buruk ini yang mendorong Plato untuk memikirkan suatu negara yang lebih baik dari pada sebelumnya. “Semua negara sekarang ini diperintah secara buruk”. Dalam *Politeia*, Plato mencita-citakan suatu pola kehidupan kenegaraan yang baik. Kehidupan itu akan tercapai bila masyarakat ditata menurut cita-cita keadilan.⁴ Dan juga negara terbentuk karena tak seorang individu pun mampu hidup sendirian. Setiap individu membutuhkan orang lain.⁵ Dengan pandangan semacam itu, Plato dapat membangun suatu model negara. Dalam negara terdapat tiga golongan, yakni (1) golongan penjamin nafkah, (2) para penjaga, dan (3) para pemimpin.⁶

Plato dengan ajarannya tentang negara berusaha memikirkan negara yang lebih baik dari pada sebelumnya. Muridnya Aristoteles dengan pemikirannya bertolak belakang dengan Plato (gurunya) yakni: Negara bukan yang ideal ala Plato yang menyerahkan kepemimpinan negara kepada seorang filsuf. Menurut

³ Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016), hlm. 204.

⁴ Simon Petrus L. Tjahjadi, *Petualangan Intelektual*, (Yogyakarta: Kanisius, 2004), hlm. 56-57.

⁵ Otto Gusti Madung, *Filsafat Politik Negara Dalam Bentangan Diskursus Filosofis*, (Maumere: Ledalero, 2013), hlm. 18.

⁶ Simon Petrus L. Tjahjadi, *Loc. Cit.*

Aristoteles, negara terjadi berkat adanya sifat kodrati setiap individu untuk hidup bersama. Dari kodratnya, manusia adalah makhluk ber-*polis*. Adapun tujuan negara (*polis*) adalah memungkinkan hidup yang baik dan membahagiakan para warganya. Tentang bagaimana negara harus diatur, Aristoteles mempunyai ajaran sederhana. Negara menjadi baik bila diarahkan pada kepentingan umum, dan sebaliknya negara menjadi buruk bila hanya diarahkan pada kepentingan si penguasa. Menurut Aristoteles ada tiga bentuk negara yang baik, yaitu monarki, aristokrasi, dan politeia.⁷

Sedangkan dalam sejarah filsafat abad pertengahan ada dua pandangan tentang ajaran negara yakni; Ajaran Augustinus tentang negara, Augustinus membedakan dua komunitas, yakni komunitas Allah (*civitas dei*) dan komunitas duniawi (*civitas terrena*).⁸ “Plato, Aristoteles, dan Augustinus boleh dipandang sebagai tiga guru agung pemikiran politik barat. Tetapi ada satu orang yang kiranya harus disejajarkan dengan tokoh-tokoh itu walaupun ia hanya seorang murid, yaitu ‘raja skolastik’ Thomas Aquinas.” Thomas Aquinas (1224-1274) tidak dapat diragukan merupakan pemikir Abad Pertengahan di Eropa yang paling besar dan paling berpengaruh sampai hari ini. Perhatiannya pada bidang kenegaraan dan politik hanya merupakan sebagian kecil dari jangkauan ulasannya. Ia membatasi diri dari pada dua hal yang bagi kita paling relevan: (1) hubungan negara dengan hukum kodrat, dan (2) hal tujuan negara.⁹

⁷ *Ibid.*, hlm. 73-75.

⁸ *Ibid.*, hlm. 119.

⁹ Franz Magnis-Suseno, *Op. Cit.*, hlm. 239-240.

Paham negara Thomas Hobbes bertolak belakang dengan paham Thomas Aquinas. Kalau Thomas Aquinas menempatkan negara ke dalam kerangka rasionalitas dan kesosialan kodrat manusia, maka Hobbes menggambarkan negara sebagai makhluk raksasa (*Leviathan*) dan menakutkan yang melegitimasi diri semata-mata karena kemampuannya untuk mengancam.¹⁰ Sedangkan John Locke membentuk filsafat negaranya dengan menganalisis perkembangan keadaan masyarakat. Secara garis besar, Locke melihat ada tiga perkembangan keadaan masyarakat, yakni pertama: keadaan alamiah (*the state of nature*), kedua: keadaan perang (*the state of war*), dan ketiga: negara (*commonwealth*) yang dibentuk dengan mengadakan “perjanjian asli” (*original compact*).¹¹ Tujuan didirikannya negara atau persemakmuran adalah untuk menjamin dan melindungi milik pribadi, bukan untuk menciptakan kesamarataan atau mengontrol pertumbuhan milik pribadi.¹² John Locke juga membuat pembagian kekuasaan dalam tiga unsur, yakni (1) kekuasaan Legislatif, (2) kekuasaan eksekutif, dan (3) kekuasaan federatif.¹³

Dalam konsep kehidupan menegara, Driyarkara lebih banyak berbicara tentang kehidupan menegara dari pada bentuk negara sebagaimana banyak dibahas dalam filsafat politik.¹⁴ Melihat negara sebagai suatu lembaga yang berdiri sendiri di luar tindakan manusia. Menurut Driyarkara negara adalah kompleks perbuatan bersama yang dilakukan banyak manusia secara terus

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 246.

¹¹ Simon Petrus L. Tjahjadi, *Op. Cit.*, hlm. 238-239.

¹² *Ibid.*, hlm. 240.

¹³ *Ibid.*, hlm. 241-242.

¹⁴ Driyarkara, *Driyarkara Tentang Negara Dan Bangsa*, (Yogyakarta: Kanisius, 1980), hlm. 7.

menerus untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan kesejahteraan bersama.¹⁵ Untuk mengerti hakekat kehidupan negara Driyarkara menganalogikannya dengan pengalaman manusia yakni percakapan.¹⁶ Dalam percakapan kita melihat dua orang menjadi satu. Demikian juga dengan dan dalam me-negara banyak manusia menjadi satu. Negara jangan dipandang sebagai yang statis tetapi memandang negara sebagai yang dinamis. Negara adalah kehidupan, jadi manusia tidaklah bernegara melainkan menegara. Manusia menegarakan dirinya secara total dalam tindakan-tindakan riilnya. Negara ada karena hidup sosialitas manusia, maka sebagai warga negara tidak bernegara melainkan menegara, penegaraan kita itulah negara. Manusia Indonesia adalah manusia yang berdemokrasi, sebagai manusia yang berdemokrasi melihat sesamanya sebagai satu keluarga, dan dalam satu kesatuan kerja dengan menjunjung sifat dan sikap gotong royong. Penulis ingin mengulas tentang apa yang sebenarnya yang dimaksudkan oleh Nicolaus Driyarkara dengan konsep kehidupan negara, sehingga masyarakat menyadari apa yang sebenarnya dan sepatutnya tentang kehidupan negara itu.

Karena itu penulis berusaha mendalami pemikiran ini di bawah judul:

KONSEP KEHIDUPAN MENEGARA MENURUT NICOLAUS DRIYARKARA

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka ada beberapa pokok persoalan dapat saya rumuskan sebagai berikut:

¹⁵ Silvano Keo Bhaghi, *Negara Bukan-Bukan*, (Mauwere: Ledalero, 2016), hlm. 162.

¹⁶ *Ibid.*

1. Apa pandangan Nicolaus Driyarkara tentang Negara?
2. Bagaimana pandangan Nicolaus Driyarkara tentang Manusia dalam bidang kehidupannya?
3. Bagaimana pandangan Kehidupan Menegara Nicolaus Driyarkara dan relevansinya bagi kehidupan manusia Indonesia?

1.3. Tujuan Penulisan

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan penulisan yang mau dicapai dalam tulisan ini adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan di atas antara lain menjawab problem apa itu pandangan negara menurut Nicolaus Driyarkara, bagaimana pandangan Nicolaus Driyarkara tentang manusia dalam bidang kehidupannya, dan pandangan kehidupan menegara Nicolaus Driyarkara dan relevansinya bagi kehidupan manusia Indonesia.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tulisan ini memiliki tujuan khusus yakni untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1) pada Fakultas Filsafat Agama, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Tujuan ini juga tidak hanya sebatas pada taraf memperoleh gelar sarjana tetapi lebih sebagai model pembelajaran bagi penulisan untuk merumuskan gagasan filosofis dalam mengembangkan sikap ilmiah dalam diri penulis.

1.4 Kegunaan Penulis

1.4.1 Akademis

Tulisan ilmiah ini dibuat sebagai persyaratan akademik yang dituntut bagi setiap mahasiswa Fakultas Filsafat, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang sebelum menyelesaikan pendidikan di universitas ini.

1.4.2 Institusional

Studi atas pemikiran Nicolaus Driyarkara ini diharapkan dapat menambah khazanah pengetahuan di lingkungan Fakultas Filsafat Unwira Kupang. Kajian tentang konsep kehidupan menegara menurut Nicolaus Driyarkara, diharapkan mampu memperluas pengetahuan dan refleksi mengenai konsep kehidupan menegara untuk mencapai pengetahuan dalam bertindak mahasiswa Fakultas Filsafat Unwira Kupang. Penulis juga mengharapkan agar dengan tulisan ini, ada mahasiswa di waktu mendatang yang kembali meneliti dan mendalami pemikiran-pemikiran Nicolaus Driyarkara ini.

1.4.3 Individual

Studi ini diharapkan akan membantu penulis dalam hal memahami sebuah tema tertentu, dengan melakukan pengumpulan data, pengolahan hingga penulisan, dengan tetap memperhatikan kriteria penulisan ilmiah yang baik dan benar.

1.4.4 Sosial

Adapun studi dan tulisan ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pengetahuan untuk masyarakat. Sehingga masyarakat mempunyai pemahaman

yang baru dan mendalam tentang konsep kehidupan menegara Nicolaus Driyarkara.

1.5 Metode Penelitian

Dalam menguraikan pemikiran Nicolaus Driyarkara tentang konsep kehidupan menegara, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan. Penulis berusaha mencari dan merangkum data-data kepustakaan dari buku-buku menyangkut tema tulisan. Dari literatur-literatur itu, penulis berusaha mengumpulkan kemudian mengkaji pemikiran Nicolaus Driyarkara dan pemikiran teoritis lain tentangnya, dengan bahasa dan pemahaman penulis sendiri.

1.6 Sistematika Penulisan

Agar dapat dipahami secara runut sistematis, maka tulisan ini disajikan dengan sistematika dan keseluruhan skripsi ini terdiri dari lima bab sebagai berikut:

Pertama, Bab I, yaitu bagian pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, maksud dan tujuan penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Kedua, Bab II, yaitu bagian di mana penulis memperkenalkan tokoh studi ini, Nicolaus Driyarkara. Karena itu dalam bagian ini penulis memaparkan sekaligus biografi dan karya-karya Nicolaus Driyarkara, dan menampilkan pemikiran dari beberapa filsuf dari zaman Yunani kuno sampai dengan Modern

tentang konsep negara. Selain itu pula, penulis menampilkan latar belakang intelektual Nicolaus Driyarkara.

Ketiga, Bab III, yaitu bagian di mana penulis menampilkan Pokok-pokok pemikiran Nicolaus Driyarkara tentang manusia dalam bidang kehidupannya yang dijabarkan dalam beberapa poin, tentang manusia, manusia dalam bidang pendidikan, manusia dalam kebudayaan dan tempat manusia dalam Pancasila.

Keempat, Bab IV tentang konsep kehidupan menegara Nicolaus Driyarkara. Di sini penulis mencantumkan pengertian negara menurut Driyarkara dan kehidupan menegara serta relevansinya pemikiran Driyarkara bagi kehidupan manusia Indonesia yang berlandaskan pada ideologi Pancasila Driyarkara.

Kelima, Bab V merupakan bagian penutup yang berisikan analisis kritis dan kesimpulan.